

Etika Rasionalisme Versus Etika Voluntarisme; Studi Kritis Mu'tazilah dan Asy'ariyah *

*(Ethics of Rationalism Versus Ethics Voluntarism;
Mu'tazilah and Ash'ariyah Critical Studies)*

Havis Aravik,¹ Choiriyah²

STEBIS Indo Global Mandiri (IGM) Palembang

DOI: [10.15408/sjsbs.v5i1.7902](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v5i1.7902)

Abstract:

This study discusses the ethics of rationalism versus voluntarism ethics, where morals in principle have been debated by experts for a long time, among them Mu'tazilah with the ethics of rationalism and Ash'ariyah with voluntary ethics. For the Mu'tazila morality is a rational act of man in seeing which is good and what is bad, not merely determined by the demands of religion. While Asy'ariyah holds the opposite view that morality is under the control of God or with another understanding that morality presupposes religion.

Keywords: Ethics, Rationalism, Voluntarism, Mu'tazilah, Asy'ariyah

Abstrak:

Studi ini membahas tentang etika rasionalisme versus etika voluntarisme, di mana moral pada prinsipnya telah menjadi perdebatan para ahli kalam sejak lama, di antaranya Mu'tazilah dengan etika rasionalisme dan Asy'ariyah dengan etika voluntarisme. Bagi Mu'tazilah moralitas adalah sebuah tindakan rasional manusia dalam melihat mana yang baik dan mana yang buruk, tidak semata ditentukan oleh tuntutan agama. Sedangkan Asy'ariyah berpandangan sebaliknya bahwa moralitas berada di bawah kontrol Tuhan atau dengan pengertian lain moralitas itu mengandaikan agama.

Kata Kunci: Etika, Rasionalisme, Voluntarisme, Mu'tazilah, Asy'ariyah

* Diterima: 24 Maret 2018, Revisi: 11 April 2018, Diterima 22 Mei 2018.

¹ Havis Aravik adalah dosen pada Fakultas Syariah Prodi Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah IGM Palembang. E-mail: havis@stebisigm.ac.id.

² Choiriyah adalah dosen pada Fakultas Syariah Prodi Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah IGM Palembang. E-mail: choiriyahchoi23@gmail.com.

Pendahuluan

Setiap agama memberikan perhatian yang besar terhadap aspek etis perilaku manusia dengan caranya yang unik. Secara umum terdapat persamaan antara berbagai agama dalam permasalahan moral dan etika.³ Sesungguhnya sangat penting membentuk karakter moral yang berperan sebagai fungsi paling mendasar dari agama, sedangkan fungsi lainnya adalah bagian darinya.⁴

Islam adalah agama yang hadir di muka bumi ini untuk menyampaikan ajaran-ajaran tentang kemanusiaan dan keadilan bagi seluruh umat manusia. Ajaran-ajaran Islam perlu dipahami melalui jalan praksis karena fungsi agama ini adalah untuk memberikan solusi-solusi yang terbaik atas segala problem sosial yang ada dalam masyarakat. Menurut Hasan Hanafi, Islam adalah etika, wawasan kemanusiaan, ilmu sosial dan ideologi. Secara singkat, Islam adalah penggambaran manusia dalam masyarakat mulai dari kebutuhan utamanya, komitmen moralnya dan perbuatan sosialnya.⁵ Nilai etis dan konsep moral Islam sangat berbeda dengan agama-agama lainnya, baik yang bersifat spesifik maupun universal. Nilai etis dan konsep moral tersebut salah satunya diwakili oleh Mu'tazilah dengan rasionalisme dan Asy'ariyah dengan voluntarisme.

Defenisi Rasionalisme dan Volunatrisme

Secara etimologi rasionalisme berasal dari bahasa latin, *ratio* yang bearti pikiran. Dalam bahasa Yunani terdapat 3 istilah yang secara garis besar maknanya sama yakni *phronesis*, *nous* dan *logos*. Secara terminologi rasionalisme adalah kemampuan untuk melakukan abstraksi, memahami, menghubungkan, merefleksikan, memperhatikan kesamaan-kesamaan dan perbuatan-perbuatan dan sebagainya atau kemampuan untuk menyimpulkan.

Rasio dianggap sebagai ciri khas manusia yang membedakannya dengan makhluk-makhluk lain yang lebih rendah. Rasio juga berbeda dengan iman, wahyu, intuisi, emosi atau perasaan, persepsi, dan pengalaman.⁶ Rasionalisme

³ Dalam tradisi filsafat istilah etika lazim difahami sebagai suatu teori ilmu pengetahuan yang mendiskusikan mengenai apa yang baik dan apa yang buruk berkenaan dengan perilaku manusia. Dengan kata lain, etika merupakan usaha dengan akal budinya untuk menyusun teori mengenai penyelenggaraan hidup yang baik. Persolan etika muncul ketika moralitas seseorang atau suatu masyarakat mulai ditinjau kembali secara kritis. Moralitas berkenaan dengan tingkah laku yang konkrit, sedangkan etika bekerja dalam level teori. Nilai-nilai etis yang difahami, diyakini, dan berusaha diwujudkan dalam kehidupan nyata kadangkala disebut *ethos*. Paul W. Taylor, *Problems of Moral Philosophy*. California: Deckenson Publishing Compant Inc, h. 3

⁴ Ashgar Ali Engineer, Penj. Forstudia, *Islam Masa Kini*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, h. 243.

⁵ Hasan Hanafi, *Agama, Kekerasan, dan Islam Kontemporer*, Terj. Ahmad Najib, Yogyakarta: Jendela, 2001, h. 89.

⁶ Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005, h. 925-926.

juga dimaknai sebagai pandangan bahwa manusia mengetahui apa yang dia pikirkan dan akal mempunyai kemampuan untuk mengungkapkan dengan dirinya sendiri atau bahwa pengetahuan itu diperoleh dengan membandingkan ide dengan ide.⁷

Secara etimologi volunterisme berasal dari bahasa Latin *Voluntas*, yang berarti berkehendak, kemauan, keinginan. Sedangkan menurut *terminologi* volunterisme adalah kehendak yang merupakan faktor terpenting dalam hidup. Dalam bidang etika, volunterisme dipandang sebagai perbuatan, perilaku baik itu karena kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan dapat ditemukan di dalam wahyunya. Karena di dalam wahyu sudah terdapat segala keputusan dan perintah Tuhan.⁸

Orang yang mau hidup baik cukup memperhatikan dan menaati keputusan dan perintah Tuhan itu. Sehingga tidak perlu bersusah payah berfilsafat dan berusaha sekuat tenaga menemukan hakikat perkara dan mendengarkan tuntutanannya. Dalam pandangan volunterisme, cara tersebut sangat membuang waktu dan tenaga; *pertama*, karena keputusan dan perintah Tuhan jelas tertulis dalam kitab Suci. *Kedua*, pikiran manusia itu terbatas sehingga tak akan mampu menemukan sendiri hakikat kebaikan dan kejahatan.⁹

Kemampuan dan Tanggung Jawab Manusia

Tingkah moral didefinisikan dalam hubungannya dengan manusia yang sadar (*alim*) dan mampu (*qadir*). Kesadaran mengandung kualitas moral umum dari suatu tingkah seperti telah ditetapkan secara rasional dan agama. Kekuasaan (*qudrah*) atau kemampuan (*istitha'ah*) memberikan hasil secara langsung (*mubasyarah*) atau tidak langsung (*bi al-tawallud*).¹⁰

Madzhab Mu'tazilah secara penuh mengatakan bahwa kemampuan sebagai prakondisi moralitas. Maka Tuhan terbebas dari tanggungjawab atas perbuatan manusia apakah baik atau buruk karena tanggung jawab tersebut hanya milik manusia.¹¹ Karakteristik dasar dari perbuatan berkehendak adalah hubungannya dengan kehendak apa yang benar-benar diniatkan. Karenanya memungkinkan bahwa suatu perbuatan akan terjadi dengan cara tertentu, jika tidak kehendak secara sengaja menentukan kejadian ini dan mewujudkannya melalui organ tubuh. Dalam pandangan ini, kehendak berbeda dengan keinginan maupun kemauan dalam hal berikut: *Pertama*, kehendak menentukan

⁷ Herold H. Titus dan Marliyn S. Smith, Richard T. Nolan, *Persoalan-persoalan Filsafat*, Terj. M. Rasjidi, Jakarta: Bulan Bintang, 1984, h. 201.

⁸ A. Mangunhardjana, *Isme-Isme dalam Etika*, Yogyakarta: Kanisius, 2000, h. 237.

⁹ A. Mangunhardjana, *Isme-Isme dalam Etika*, h. 237

¹⁰ Majid Fakhry, *Etichal Theories in Islam*, Terj. Zakiyuddin Baidhawiy, *Etika dalam Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Universitas Muhammadiyah Surakarta, 1996, h. 32.

¹¹ Majid Fakhry, *Ibid*, h. 33

terjadinya suatu perbuatan tetapi keinginan dan kemauan tidak. *Kedua*, kehendak diarahkan kepada objek yang berlawanan tetapi keinginan tidak. *Ketiga*, kesenangan dihasilkan oleh kemauan dan bukan kehendak. *Keempat*, kemauan dapat bertambah dan berkurang sedangkan kehendak tetap konstan. *Kelima*, kehendak berada di dalam kekuasaan manusia tetapi kemauan tidak.

Keinginan juga memiliki perberbedaan dengan kehendak dalam hal: (a) keinginan berlaku pada masa yang telah lewat, seperti ketika kita menginginkan sesuatu dapat dilakukan namun tidak dapat tercapai, (b) keinginan tidak menghasilkan objek keinginan, sementara kehendak mengakibatkan objek tertentu seperti teori "generasi" berasumsi, (c) kehendak dapat menjadi objek bagi dirinya sendiri seperti ketika berkehendak untuk berkehendak tetapi keinginan tidak, dan (d) kehendak memiliki lawan sedangkan keinginan tidak.¹²

Dalam memahami masalah tersebut kalangan Asy'ariyah al-Baqillani (w. 1013) menyatakan bahwa secara instinktif (*min nafsih*) dapat membedakan antara perbuatan-perbuatan sukarela (*voluntary action*) seperti berdiri dan duduk, dan perbuatan-perbuatan tidak sukarela (*involuntary action*) seperti menggigil dan tertawa. Ia juga mengetahui bahwa kedua tipe perbuatan itu tidak berbeda dalam jenis, cara atau kehendaknya bahkan dalam kemampuan yang diciptakan dalam dirinya oleh Tuhan pada setiap melakukan perbuatan sukarela.¹³

Pencipta memiliki pengetahuan yang komprehensif tentang suatu objek sementara manusia memiliki pengetahuan yang tertentu dan terbatas. Lagi pula kekuasaan yang diciptakan yang dengannya manusia berbuat atas dasar objeknya (*al-maqdur*) dalam cara yang khusus. Kekuasaan dapat berbuat atas dasar objeknya secara universal berkompeten untuk menghasilkan setiap jenis wujud. Karena di dalam wujud atau eksistensi seluruh aksiden atau subtansi sama tergantungnya kepada Pencipta di mana wujud-wujud itu berasal.¹⁴

Jika muncul pertanyaan dimanakah tanggung jawab bagi perbuatan perolehan berlaku, maka jawabannya hanya ada pada aspek-aspek yang tergantung pada "kekuasaan yang diciptakan" dari manusia dan yang bertanggung jawab untuk mengubah melalui perbuatannya, daripada wujud asli yang tergantung secara eksklusif terhadap "kekuasaan kreatif atau abadi". Bahkan kekuasaan yang diciptakan dari manusia tidak pernah tergantung pada Tuhan yang setiap saat menciptakan dalam diri manusia kekuasaan atau kemampuan (*istitha'ah*) semacam itu seperti yang diproposisikan pada hasil perbuatan yang diniatkan.

Manusia dengan dirinya sendiri secara keseluruhan tidak mampu membuat rancangan-rancangan bagi dirinya sendiri karena ia kurang memiliki

¹² Majid Fakhry, *Ibid*, h. 36.

¹³ Majid Fakhry, *Ibid*, h. 57.

¹⁴ Majid Fakhry, *Ibid*, h. 58.

kecukupan dan kemerdekaan diri yang benar-benar mujarab. Secara instinktif ia mengetahui ukuran ketergantungan dan kebutuhannya terhadap bantuan dalam perbuatan apapun yang dilakukan. Demikianlah mengapa secara konstan manusia selalu membutuhkan Tuhan untuk memberikan bantuan dan pertolongan padanya.¹⁵

Kebijaksanaan dan Keadilan Tuhan

Manusia yang berakal sempurna, jika berbuat sesuatu, mesti mempunyai tujuan. Manusia yang demikian berbuat atau untuk kepentingan dirinya sendiri ataupun untuk kepentingan orang lain. Tuhan juga mempunyai tujuan dalam perbuatan-perbuatan-Nya, tetapi karena Tuhan Maha Suci dari sifat berbuat untuk kepentingan diri sendiri, perbuatan-perbuatan Tuhan adalah untuk kepentingan *mawjud* lain, selain Tuhan. Kaum Mu'tazilah berkeyakinan bahwa wujud ini diciptakan untuk manusia, sebagai makhluk tertinggi, dan oleh karena itu mereka mempunyai kecenderungan untuk melihat segala-galanya dari sudut kepentingan manusia.¹⁶

Keadilan Tuhan erat hubungannya dengan hak, dan keadilan diartikan memberi seseorang akan haknya. Kata-kata "Tuhan Adil" mengandung arti bahwa segala perbuatan-Nya adalah baik, bahwa Ia tidak dapat berbuat yang buruk, dan bahwa Ia tidak dapat mengabaikan kewajiban-kewajiban-Nya terhadap manusia. Oleh karena itu, Tuhan tidak dapat berbuat zalim dalam memberi hukuman, tidak dapat menghukum anak orang *musyrik* lantaran dosa orang tuanya, tidak dapat meletakkan beban yang tak dapat dipikul oleh manusia, dan mesti memberi upah kepada orang yang patuh kepada-Nya dan memberi hukuman kepada orang yang menentang perintah-Nya. Selanjutnya keadilan juga mengandung arti berbuat menurut semestinya serta sesuai dengan kepentingan manusia, dan memberi upah atau hukuman kepada manusia sejajar dengan corak perbuatannya.¹⁷

Al-Mas'udi dalam kitabnya, *Muruj al-Dzahab* sebagaimana dikutip Majid Fakhry memperkuat pendapat tentang keadilan Tuhan. Menurutnya, Tuhan tidak menyukai kerusakan, dan tidak menciptakan perbuatan manusia, tetapi manusialah yang melakukan apa yang diperintahkan dan yang dilarang dengan daya (*qudrah*) yang diberikan dan diletakkan Allah kepada mereka. Dia tidak memerintahkan sesuatu kecuali yang dikehendaki-Nya. Dia mengayomi segala kebaikan yang diperintahkan dan berlepas diri dari segala kejahatan yang dilarang-Nya. Dia tidak membebani manusia kecuali yang dapat mereka pikul, serta tidak menghendaki sesuatu yang mereka tidak sanggup melaksanakannya.

¹⁵ Majid Fakhry, *Ibid*, h. 58-59.

¹⁶ Harun Nasution, *Teologi Islam*, Jakarta: UI Press, 1986, h. 123.

¹⁷ Harun Nasution, *Ibid*, h. 124-125.

Seorang yang tidak mampu meraih atau melepaskan sesuatu kecuali karena adanya *qudrah* yang diberikan Tuhan kepadanya untuk itu. Dialah pemilik *qudrah* itu, bukan manusia, Dia bisa memaksa makhluk-Nya untuk mematuhi-Nya dan secara otomatis menghalangi mereka melakukan maksiat, tetapi Dia tidak melakukan hal itu, karena jika demikian berarti Dia menghilangkan ujian dan cobaan-Nya (dari diri manusia).¹⁸

Bagi madzhab Mu'tazilah, keadilan adalah asas etika. Keadilan Tuhan adalah salah satu lima asas yang diyakini Mu'tazilah. Mereka kerap menerapkan asas keadilan sebelum asas tauhid, sehingga mereka sering disebut sebagai "*ahl al-'adl wa al-tauhid*". Dalam madzhab Mu'tazilah, ada korelasi antara asas keadilan dan asas tauhid. Bagi Mu'tazilah, tauhid adalah sifat terpenting dari zat Tuhan, sedang keadilan adalah sifat terpenting dari perbuatan Tuhan. Dengan pengertian keadilan seperti ini, maka ada relasi antara Tuhan dan manusia, sebuah relasi yang berbasis pada keadilan mutlak dari sisi Tuhan. Mu'tazilah berkeyakinan bahwa seluruh yang dilakukan Tuhan sepenuhnya adalah adil.¹⁹

Menurut al-Syahrastani keadilan dalam persepsi Mu'tazilah adalah "kebijaksanaan rasional untuk melakukan perbuatan secara benar dan berguna". Sehingga, dalam pemikiran Mu'tazilah, akal mengharuskan segala perbuatan yang bersumber dari Tuhan dan yang berkaitan dengan manusia mukallaf, berdasarkan pada kebijaksanaan Tuhan dan mengandung maslahat bagi umat manusia.²⁰ Pengertian keadilan menurut Mu'tazilah juga berarti berbuat menurut semestinya serta sesuai dengan kepentingan manusia.²¹ Dengan pengertian demikian, perbuatan manusia perlu didasarkan atas pertimbangan rasional, menuju pada keadilan, dan mengarah pada kepentingan manusia.

Sedangkan Asy'ariyah secara umum sepakat tentang supremasi kekuasaan Tuhan karena Tuhan Yang Maha Kuasa tidak menentukan kewajiban (*taklif*) terhadap pembantu-Nya (*malaiikat*) sehingga Ia benar-benar menjadi adil. Selain itu, Tuhan dapat menambah atau mengurangi apa yang telah Ia tentukan. Mereka menolak argumentasi Mu'tazilah bahwa Tuhan mempunyai tujuan dalam perbuatan-Nya. Bagi mereka perbuatan-perbuatan Tuhan tidak mempunyai tujuan, tujuan dalam arti sebab yang mendorong Tuhan untuk berbuat sesuatu. Tuhan berbuat semata-mata karena kekuasaan dan kehendak mutlak-Nya dan bukan karena kepentingan manusia atau karena tujuan lain.²²

Keadilan bagi kaum Asy'ariyah adalah menempatkan sesuatu pada tempat yang sebenarnya, yaitu mempunyai kekuasaan mutlak terhadap harta

¹⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Tarikh al-Madzahib al-Islamiyah*, Terj. Abd. Rahman Dahlan dan Ahmad Qarib, *Aliran Politik dan Aqidah dalam Islam*, Jakarta: Logos, 1996, h. 152.

¹⁹ Ahmad Mahmud Shubhi, *Filsafat Etika*, terj. Yunan Askaruzzaman, Jakarta: Serambi, 2001, h. 44-45.

²⁰ Ahmad Mahmud Shubhi, *Ibid*, h. 46.

²¹ Harun Nasution, *Op. cit*, h. 125.

²² Harun Nasution, *Ibid*, h. 123.

yang dimiliki serta mempergunakannya sesuai dengan kehendak dan pengetahuan pemilik. Dengan demikian keadilan Tuhan mengandung arti bahwa Tuhan mempunyai kekuasaan mutlak terhadap makhluk-Nya. Ketidakadilan, sebaliknya berarti menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, yaitu berkuasa mutlak terhadap hak milik orang lain.

Oleh karena itu, Tuhan dalam faham kaum Asy'ariyah dapat berbuat apa saja yang dikehendaki-Nya, sungguhpun hal demikian itu, menurut pandangan manusia tidak adil. Al-Asy'ari berpendapat bahwa Tuhan tidaklah berbuat salah kalau memasukkan seluruh manusia ke dalam sorga dan tidak bersifat zalim jika Ia memasukkan seluruh manusia ke dalam neraka. Perbuatan salah dan tidak adil adalah perbuatan yang melanggar hukum, dan karena di atas Tuhan tidak ada undang-undang atau hukum, perbuatan Tuhan tidak pernah bertentangan dengan hukum. Dengan demikian Tuhan tidak bisa dikatakan bersifat tidak adil.²³

Suatu perbuatan jika dilarang Tuhan maka perbuatan itu menjadi terlarang dan jika dilakukan oleh manusia maka menjadi kejahatan. Dasar-dasar kebaikan dan keburukan tidak ditentukan secara rasional, dengan kata lain semua manusia rasional akan setuju dengan dasar-dasar tersebut dan perbuatan-perbuatan tertentu akan menjadi baik atau buruk tergantung sejauh mana perbuatan tersebut memiliki sifat-sifat dan ambil bagian dalam perbuatan yang tercela. Tuhan adalah wujud yang memerintah (*al-Qahir*) di mana seluruh yang ada adalah milik-Nya dan selain Dia bukanlah Pemerintah (*amir*) yang memperbolehkan atau melarang.²⁴

Perbedaan antara Etika Mu'tazilah dan Asy'ariyah.

Ada perbedaan yang sangat signifikan antara etika rasionalisme Mu'tazilah dan etika voluntarisme Asy'ariyah. Perbedaan tersebut sangat terlihat di mana Mu'tazilah merupakan salah satu aliran dalam teologi Islam yang dalam banyak pemikirannya menempatkan akal (*rasio*) sebagai sumber pengetahuan utama, sedangkan wahyu sebagai pendukung kebenaran akal. Apabila terdapat pertentangan antara keduanya, maka wahyu perlu ditakwilkan (dengan penalaran rasional) sehingga sesuai dengan ketetapan akal. Sebagai sebuah aliran, Mu'tazilah memang merupakan aliran yang memiliki tanggung jawab sosial yang besar. Tanggung jawab sosial ini tercermin pada lima prinsip (*Al-Ushul al-Hamsah*) yang dimilikinya.²⁵

Adapun kelima prinsip yang merupakan ajaran dasar Mu'tazilah adalah sebagai berikut:

²³ Harun Nasution, *Ibid*, h. 125-126.

²⁴ Majid Fakhry, *Op. cit*, h. 59-61.

²⁵ Afif Muhammad, *Dari Teologi ke Ideologi*, Bandung: Pena Merah, 2004, h. 16.

1. *At-Tauhid* (Keesaan)

Golongan Mu'tazilah sendiri menganggap konsep tauhid mereka paling murni sehingga mereka senang disebut *Ahl-Tauhid* (Pembela Tauhid).²⁶ Atas dasar prinsip tauhid tersebut di atas maka Mu'tazilah berpendapat bahwa Allah mustahil dapat dilihat pada hari kiamat, dengan kata lain mereka mengingkari melihat Allah SWT dengan penglihatan. Sekalipun begitu mereka berbeda anggapan, apakah Allah dapat dilihat melalui melalui hati sanubari. Abu Huzail dan sebagian besar pengikut Mu'tazilah berkata "Kami melihat Allah SWT dengan hati sanubari, yang berarti dengan hati sanubari itulah kami mengetahuinya."²⁷

Golongan Mu'tazilah juga menafikan segala sifat sehingga mereka biasa juga di sebut dengan golongan *nafy as-sifat*. Yang mereka maksud dengan peniadaan sifat-sifat Tuhan adalah bahwa Tuhan tidak mempunyai sifat yang berdiri sendiri di luar Zat-Nya, karena itu dapat membawa pada adanya yang qadim selain Tuhan. Semua yang di maksud oleh golongan yang lain sebagai sifat-sifat Tuhan yang melekat pada zat Tuhan, bagi golongan mutazilah di sebut bukan sifat Tuhan. Tegasnya golongan Mu'tazilah enggan mengakui adanya sifat Tuhan dalam pengertian sesuatu yang melekat pada Zat Tuhan. Kalau tuhan dikatakan mempunyai sifat Maha mengetahui, bagi mereka yang Maha mengetahui itu bukan sifat melainkan Zat-Nya.²⁸ Mutazilah juga berpendapat bahwa al-Qur'an itu makhluk. Sesuai dengan konsep Mu'tazilah yang menyebutkan bahwa hanya Allah SWT yang Maha *Qadim* dan *Azali* karena sifatnya adalah esensinya, maka sebagai kelanjutan dari konsep tersebut, mereka berpendapat bahwa Al-quran itu makhluk, sesuatu yang baru (*hadits*) yang menempati ruang²⁹ Karena al-Quran itu di luar zat Allah, segala sesuatu yang berada di luar Zat Allah adalah makhluk dan tidak *qadim*.³⁰

2. *Al- Adl* (Keadilan)

Ajaran dasar Mu'tazilah yang kedua adalah *al-Adl*, yang berarti Tuhan maha adil. Adil ini merupakan sifat yang paling gamblang untuk menunjukkan kesempurnaan. Karena tuhan maha sempurna, dia sudah pasti adil. Ajaran ini bertujuan ingin menempatkan Tuhan benar-benar adil menurut sudut pandang

²⁶ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2001, h. 292.

²⁷ Abul Hasan Isma'il al-Asy'ari, *Maqaalat al- Islamiyah wa-Ikhtilaf al-Mushallin*, Terj. A.Natsir Yusuf & Karsidi Diningrat, Bandung: Pustaka Setia, 1998, h. 222.

²⁸ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Op. cit*, h. 292

²⁹ Abu Lubaba Husain, *Pemikiran Hadits Mu'tazilah*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003, h. 46

³⁰ Soekarno dan Ahmad Soepardi, *Sejarah dan Filsafat Pendidikan Islam*, Bandung: Angkasa, 1985, h. 128

manusia, karena alam semesta ini sebenarnya diciptakan untuk kepentingan manusia. Tuhan di pandang adil apabila bertindak hanya yang baik saja (*ash-Shalahah*) dan terbaik (*al-ashlah*). Dan bukan yang tidak baik. Begitu pula Tuhan itu adil bila tidak melanggar janji-Nya.³¹

Ada tiga hal pokok yang memberi penekanan Mu'tazilah sehubungan dengan prinsip keadilan ilahi, yaitu; *Pertama*, bahwa Allah mengarahkan makhluk-Nya kepada suatu tujuan dan bahwa Allah menghendaki yang terbaik bagi hamba-Nya. *Kedua*, bahwa Allah tidak menghendaki, dan karena itu tidak memerintahkan yang buruk. *Ketiga*, bahwa Allah tidak menciptakan perbuatan hamba-Nya yang baik maupun yang buruk; manusia itu bebas dan ia menciptakan perbuatannya dan itu menjadi dasar adanya pahala dan hukuman.³²

3. *Al-Wa'du wa-al-Waid (Janji dan ancaman)*

Konsep ajaran Mu'tazilah yang ke tiga ini berkaitan erat dengan konsep ajaran *al-Adl*. Tuhan maha adil dan bijaksana dan tidak pula akan melanggar janjinya. Siapa yang berbuat kebaikan akan diganjar dengan kebaikan dan siapa yang berbuat keburukan akan di ganjar pula dengan keburukan. Meskipun Tuhan sebenarnya sanggup memasukkan orang berdosa besar ke dalam sorga dan menjerumuskan orang mukmin ke dalam neraka, namun Tuhan mustahil melakukan itu semua karena bertentangan dengan keadilannya. Ajaran ini lebih bersifat motivasi kepada manusia untuk selalu melakukan perbuatan yang baik dan meninggalkan perbuatan yang buruk.³³

4. *Al-Manzilatu baina al- Manzilatain (Posisi di antara dua posisi)*

Paham ini merupakan ajaran dasar pertama yang melahirkan munculnya Mu'tazilah. Ajaran ini timbul setelah terjadinya perdebatan antara Washil bin atha dengan Hasan al-Basri di Basrah. Bagi Mu'tazilah orang yang berdosa besar bukan termasuk kafir dan bukan pula mu'min, melainkan berada di antara keduanya, posisi antara dua mu'min dan kafir ini di sebut fasiq.

5. *Al-Amr bi- Al-Ma'ruf wa an-Nahyu an Munkar (Perintah berbuat baik dan melarang yang kemungkaran)*

Dalam prinsip Mu'tazilah, setiap muslim wajib menegakkan perbuatan yang ma'ruf serta menjauhi perbuatan yang mungkar. Atas dasar prinsip ini

³¹ Abdul Rozak dan Rosihan Anwar, *Ilmu Kalam*, Bandung: Pustaka Setia, 2006, h. 83

³² Amir Mu'alim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1999, h. 24.

³³ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Op. cit*,h. 292

Mu'tazilah dalam merealisasikan pendapatnya tidak saja melalui seruan biasa bahkan kalau perlu dengan kekerasan.³⁴ Mu'tazilah dalam sejarah pernah memaksakan ajaran ini kepada golongan lain yang di kenal dengan peristiwa *Mihnah*, yaitu memaksakan pendapatnya bahwa al-Qur'an itu tidak qadim. Dan mereka yang menentang pendapat ini wajib di hukum. Itulah salah satu contoh bagaimana Mu'tazilah menegakkan *al-amr bi- al-ma'ruf wa an-nahyu an munkar*.³⁵

Menurut Abu al-Hasan al- Khayyat dalam bukunya *al-Intishar* sebagaimana di kutip oleh Abu Zahrah dalam bukunya *Tarikh al-Madzahib al-Islamiyah* mengatakan "Tidak seorang pun berhak mengaku sebagai penganut Mu'tazilah Sebelum ia ia mengakui *al-Ushul al-Khamsah (Lima dasar)*, yaitu *al-Tauhid, al- Adl, al- wa'd al-Waid, al-Manzilah Baina al-Manzilatain* dan *al-Amr bi al-Ma'ruf wa al-Nahy 'an al-Munkar*. Jika ia telah mengakui semuanya, ia baru dapat disebut penganut Mu'tazilah.³⁶

Kalangan Mu'tazilah berpendapat bahwa etika murni adalah semua perintah Allah benar adanya, dan sifat benarnya terpisah dari perintah Allah. Dia memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu yang benar lantaran memang benar adanya, berdasarkan landasan-landasan obyektif, bukan pada perintah Allah. Allah tidak dapat menuntut kita untuk melakukan sesuatu yang benar karena aturan-aturan moralitas bukanlah ha-hal yang berada di bawah kendali-Nya.³⁷ Sedangkan menurut kalangan Asy'ariyah, makna etika murni bersifat subyektif, bisa mempunyai makna apabila ada subyek (Allah). Satu-satunya tujuan bertindak moral adalah untuk mematuhi Allah. Bagi mereka, makna moralitas hanya bisa dipahami apabila mampu bertindak selaras dengan kehendak dan perintah Allah.³⁸

Kemudian dalam masalah moral kalangan Mu'tazilah memandang moralitas adalah sebuah tindakan rasional manusia dalam melihat mana yang baik dan mana yang buruk, tidak semata ditentukan oleh tuntutan agama. Asy'ariyah berpandangan sebaliknya, bahwa moralitas berada di bawah kontrol Tuhan, atau dengan pengertian lain moralitas itu mengandaikan agama.

Salah satu tokoh Asy'ariyah yang banyak mengembangkan teori etika di dunia Islam adalah al-Ghazali. Beliau menghubungkan wahyu dengan tindakan moral. Al-Ghazali menyarankan kepada setiap untuk memandang kebahagiaan sebagai pemberian anugerah Tuhan. Al-Ghazali menganggap keutamaan-keutamaan dengan pertolongan Tuhan adalah sebuah keniscayaan dalam keutamaan jiwa. Jadi, dengan menerapkan istilah keutamaan kepada

³⁴ Harun Nasution, *Op. cit*, h. 57

³⁵ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Op. cit*, h. 293

³⁶ Muhammad Abu Zahrah *Op. cit*, h. 151.

³⁷ Oliver Leaman, *Pengantar Filsafat Islam*, Terj. Musa Kadhim dan Arif Mulyadi, Bandung: Mizan, 2001, h. 128.

³⁸ Oliver Leaman, *Ibid*, h. 127.

pertolongan Tuhan, Al-Ghazali bermaksud menghubungkan keutamaan dengan Tuhan. Tidak ada keutamaan lain yang dapat dicapai tanpa pertolongan Tuhan. Bahkan, al-Ghazali menegaskan bahwa tanpa pertolongan Tuhan, usaha manusia sendiri dalam mencari keutamaan sia-sia, dan dapat membawa kepada sesuatu yang salah dan dosa.³⁹

Tanggapan Kritis

Manusia yang sehat dapat mengetahui dengan akalnya bahwasanya adalah jahat atau buruk untuk menyakiti orang lain (kecuali hal itu diperbuat sebagai hukuman), berbohong, membunuh, mencuri dan sebagainya. Tingkah laku perbuatan disebut kewajiban atau keharusan jika seseorang akan memperoleh celaan apabila mengerjakannya.

Tingkah laku perbuatan disebut buruk atau jahat jika pelakukannya memperoleh celaan jika mengerjakannya. Oleh karena itu, setiap orang yang menggunakan akal sehatnya dapat mengetahui aturan-aturan tingkah laku perbuatannya yang baik, maka setiap orang bertanggungjawab atas perbuatannya dan dengan demikian diberi pahala atau diberi hukuman oleh Tuhan di akhirat kelak. Aturan ini juga berlaku bagi orang-orang yang hidup sebelum Islam. Tuhan memberi wewenang penuh kepada manusia untuk memilih tingkah laku perbuatannya sendiri. Hal ini perlu, jika balasan dan hukum Tuhan itu sendiri adil.⁴⁰

Gagasan keseluruhan rasionalisme Barat adalah untuk melepaskan diri dari agama dan menciptakan masyarakat yang berdasarkan secara murni pada akal. Namun dalam rasionalisme Islam Mu'tazilah tidak pernah berfikir bahwa suatu masyarakat bisa berdasarkan secara murni pada akal, atau bahwa hal seperti kenabian atau hukum Allah dapat dijelaskan berdasarkan akal semata.⁴¹

Khusus pada etika voluntarisme memupuk semangat irasionalitas dan melepaskan tanggungjawab manusia. Irasionalisme memandang hal atau perbuatan baik, karena diperintahkan Allah. Dengan demikian, pada dasarnya segala perbuatan dari segi etis netral: tidak baik, tidak buruk. Karena itu, mencuri pun, misalnya adalah netral. Jika dikehendaki Tuhan, mencuri itu dapat menjadi baik. Membunuh orang itu, misalnya lagi pada dirinya sendiri netral. Akan tetapi, seandainya Tuhan menghendakinya, membunuh orang itu dapat menjadi baik. Inilah irasional. Yang rasional, bila Tuhan menghendaki suatu hal, perbuatan, atau perilaku, semua itu harus ada dasar kebaikannya. Juga

³⁹ M. Amin Abdullah, *Antara Al-Ghazali dan Kant: Filsafat Etika Islam*, Bandung: Mizan, 2002, h. 137-138

⁴⁰ Amin Abdullah, *Falsafah Kalam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, h. 148-149.

⁴¹ Farhad Daftary (ed), *Intellectual Traditions in Islam*, Penj. Fuad Jabali dan Udjang Tholib, *Tradisi-tradisi Intelektual Islam*, Jakarta: Erlangga, h. 78.

sebaliknya, jika Tuhan tidak menghendaki sesuatu, hal itu pada dasarnya harus jahat. Rasanya aneh jika Tuhan itu semena-mena.⁴²

Berkaitan dengan unsur irasionalitas itu, tanggungjawab manusia dalam melaksanakan perintah atau kehendak Tuhan juga menjadi persoalan. Tanggungjawab berhubungan dengan akibat dari perbuatan. Orang yang melakukan suatu hal, hanya karena itu dikehendaki Tuhan dan tidak berfikir sendiri makna dan akibatnya, jelas tak bertanggung jawab atas perbuatannya. Apapun akibat perbuatan dari pelaksanaan perintah atau kehendak Tuhan itu, orang tak bersedia menanggung. Dia cuci dan lepas tangan sebab dia hanya pelaksana dari kehendak Tuhan. Karena itu, seandainya dituntut tanggung jawab hanyalah sebatas sebagai pelaksana, bukan otak atau *agent intellectualis*nya.⁴³

Masalah mendasar lainnya dari voluntarisme terletak pada ketidaktersediaannya untuk menggali kehendak Tuhan. Tuhan memang memang bijaksana. Akan tetapi, bila kebijaksanaan atau kehendak-Nya yang bijaksana itu disampaikan kepada manusia, kehendak itu menjadi terbatas. Artinya, kehendak Tuhan itu dibatasi oleh orang yang menerimanya, oleh masalah-masalah yang dihadapi waktu kehendak itu disampaikan, oleh ruang dan waktu serta kesempatan ketika kehendak itu disampaikan. Karena itu, kehendak sebagaimana adanya tidak tak terbatas atau berlaku untuk segala tempat dan zaman. Untuk menjadi tak terbatas, kehendak itu mesti dicari intinya dengan menganalisis orang, masalah, tempat, waktu, dan kesempatan pada saat kehendak itu diwahyukan. Hasil analisis itu, bila benar dilakukan merupakan inti kehendak Tuhan. Akan tetapi, inti kehendak itu tidak dengan sendirinya dapat diterapkan di segala tempat, waktu, dan kesempatan. Untuk melaksanakan dengan tepat, orang yang bersangkutan, situasi dan kondisi yang ada harus diperhitungkan.⁴⁴

Karena tidak bersedia menggali inti kehendak Tuhan, voluntarisme mendorong sikap *obskurantisme* dan menghidupkan sikap *konservatisme*. Obskurantisme berarti sikap lebih suka berada dalam kegelapan, tidak tahu, dan taat. Konservatisme dimaknai sebagai sikap yang lebih suka tak maju, karena para penganut voluntarisme dalam hidup hanya berpegang kepada kehendak Tuhan yang jelas tertulis di dalam kitab Suci. Akibatnya, kaum voluntarisme lebih suka melihat ke masa lalu daripada ke masa depan, serta mempertahankan yang ada daripada memperkembangkannya menjadi lebih maju dan lebih kaya.⁴⁵ Voluntarisme dengan demikian tak memajukan hidup, tetapi malah memupuk

⁴² A. Mangunhardjana, *Op.cit*, h. 238.

⁴³ A. Mangunhardjana, *Ibid*, h. 238.

⁴⁴ A. Mangunhardjana, *Ibid*, h. 238-239.

⁴⁵ A. Mangunhardjana, *Ibid*, h. 239.

irasionalitas, meniadakan tanggungjawab, dan berakibat pada *obskurantisme* dan *konservatisme*.⁴⁶

Kesimpulan

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa etika rasionalisme Mu'tazilah menandakan pemikiran mereka kepada *al-Ushul al-Khamsah* (Lima dasar) ,yaitu *al-Tauhid*, *al- Adl*, *al- wa'd al-Waid*, *al-Manzilah Baina al-Manzilatain* dan *al-Amr bi al-Ma'ruf wa al-Nahy 'an al-Munkar*. Dalam masalah moral kalangan Mu'tazilah memandang moralitas adalah sebuah tindakan rasional manusia dalam melihat mana yang baik dan mana yang buruk, tidak semata ditentukan oleh tuntutan agama. Di samping itu, kemampuan adalah prakondisi moralitas. Maka Tuhan terbebas dari tanggungjawab atas perbuatan manusia apakah baik atau buruk karena tanggung jawab tersebut hanya milik manusia. Sedangkan tentang kebijaksanaan dan keadilan bagi kaum Mu'tazilah mengandung arti bahwa kewajiban-kewajiban yang harus dihormati oleh Tuhan. Keadilan bukanlah hanya berarti memberi upa kepada yang berbuat baik dan memberi hukuman kepada yang salah.

Sementara etika voluntarisme tradisional Asy'ariyah berpandangan sebaliknya, bahwa moralitas berada di bawah kontrol Tuhan, atau dengan pengertian lain moralitas itu mengandaikan agama. Oleh karena itu, kemampuan dan tanggung jawab manusia semuanya menjadi kehendak-Nya karena perbuatan manusia pada hakekatnya adalah perbuatan Tuhan dan kebijaksanaan dan keadilan bagi faham Asy'ari adalah keadilan Raja absolut yang memberi hukuman menurut kehendak mutlaknya dan tidak terikat pada suatu kekuasaan kecuali kekuasaannya sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Amin *Falsafah Kalam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Abdullah, M. Amin, *Antara Al-Ghazali dan Kant: Filsafat Etika Islam*, Bandung: Mizan, 2002.
- al-Asy'ari, Abul Hasan Isma'il, *Maqaalat al- Islamiyah wa-Ikhtilaf al-Mushallin*, Terj. A.Natsir Yusuf & Karsisdi Diringrat, Bandung: Pustaka Setia, 1998.
- Bagus, Lorens, *Kamus Filsafat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Daftary, Farhad, (ed), *Intellectual Traditions in Islam*, Penj. Fuad Jabali dan Udjang Tholib, *Tradisi-tradisi Intelektual Islam*, Jakarta: Erlangga.

⁴⁶ A. Mangunhardjana, *Ibid*, h. 239.

- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2001.
- Engineer, Ashgar Ali, Penj. Forstudia, *Islam Masa Kini*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Fakhry, Majid, *Etichal Theories in Islam*, Terj. Zakiyuddin Baidhawiy, *Etika dalam Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Universitas Muhammadiyah Surakarta, 1996.
- Hanafi, Hasan, *Agama, Kekerasan, dan Islam Kontemporer*, Terj. Ahmad Najib, Yogyakarta: Jendela, 2001.
- Husain, Abu Lubaba, *Pemikiran Hadits Mu'tazilah*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003.
- Leaman, Oliver, *Pengantar Filsafat Islam*, Terj. Musa Kadhim dan Arif Mulyadi, Bandung: Mizan, 2001.
- Mangunhardjana, A. , *Isme-Isme dalam Etika*, Yogyakarta: Kanisius, 2000.
- Mu'alim, Amir dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Muhammad, Afif, *Dari Teologi ke Ideologi*, Bandung: Pena Merah, 2004.
- Nasution, Harun, *Teologi Islam*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Rozak, Abdul, dan Rosihan Anwar, *Ilmu Kalam*, Bandung: Pustaka Setia, 2006.
- Shubhi, Ahmad Mahmud, *Filsafat Etika*, terj. Yunan Askaruzzaman, Jakarta: Serambi, 2001.
- Soekarno dan Ahmad Soepardi, *Sejarah dan Filsafat Pendidikan Islam*, Bandung: Angkasa, 1985.
- Taylor, Paul W., *Problems of Moral Philosophy*. California: Deckenson Publishing Compant Inc.
- Titus, Herold H. dan Marliyn S. Smith, Richard T. Nolan, *Persoalan-persoalan Filsafat*, Terj. M. Rasjidi, Jakarta: Bulan Bintang, 1984.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Tarikh al-Madzahib al-Islamiyah*, Terj. Abd. Rahman Dahlan dan Ahmad Qarib, *Aliran Politik dan Aqidah dalam Islam*, Jakarta: Logos, 1996.